



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Focus Group Discussion
“DIPLOMASI LUAR NEGERI
DAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS MARITIM INDONESIA”**

Makassar, 17 April 2018

Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia membutuhkan konektivitas laut yang handal untuk menghubungkan titik-titik penting dari Sabang sampai Merauke. Rendahnya tingkat konektivitas nasional selama ini telah menjadi penyebab kesenjangan ekonomi antara kawasan barat dan timur Indonesia. Berupaya mewujudkan visi Poros Maritim Dunia, Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan sejumlah percepatan pembangunan untuk meningkatkan konektivitas maritim Indonesia dan membenahi sistem logistik nasional, termasuk melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan di kawasan timur Indonesia dan program Tol Laut. Diskusi ini dilakukan untuk memperoleh pandangan dari akademisi dan tokoh masyarakat dari Makassar atas pelaksanaan pembangunan konektivitas maritim kawasan timur Indonesia yang dijalankan pemerintahan Jokowi.

“Untuk memastikan program Tol Laut dapat berdampak signifikan, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu: menciptakan keseimbangan aktifitas ekonomi antar kawasan; pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; membenahi sistem transportasi laut; mengefisienkan pelabuhan laut, mengembangkan sarana dan prasarana transportasi laut; mengintegrasikan pembangunan laut dengan kebijakan pembangunan sektoral lainnya; dan mensinergikan kebijakan antar level pemerintah dan aktor pembangunan.”

(Agussalim, UNHAS)

“Pelabuhan Rakyat memiliki peran penting bagi keberhasilan program tol laut. Tanpa dukungan Pelra yang baik, pelabuhan utama akan kekurangan suplay komoditas sehingga kapal-kapal Tol Laut tidak akan mampu menyerap produk-produk lokal dari kawasan timur Indonesia yang masih tersebar.”

(M. Abduh Ibnu Hajar, UNHAS)

“Pembangunan infrastruktur pelabuhan di Makassar berpotensi menimbulkan persoalan sosial. Lokasi New Port Makassar yang sedang dibangun mengapit pelabuhan Paotere dan pemukiman penduduk. Sementara Pelabuhan Paotere juga memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi Makassar. Dikhawatirkan akan terjadi perebutan ruang antara

pelabuhan modern dan pelabuhan tradisional, yang saat ini sudah terlihat gelombang migrasi yang mencari kehidupan dari kelas menengah dan tidak mampu.”

(Asram Jaya, FIK Ornop Sulsel)

Pembangunan konektivitas maritim di kawasan timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan melalui pengembangan New Port Makassar telah berhasil merangsang kegiatan ekonomi wilayah Makassar dan sekitarnya. Kegiatan ekspor/impor yang selama ini harus melalui pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa, terutama pelabuhan di Surabaya, Semarang atau Jakarta, kini sudah dimungkinkan dilakukan langsung dari pelabuhan Makassar melalui *direct call*. Namun, sebagaimana disampaikan narasumber dari Makassar di atas, masih terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah demi memastikan tujuan akhir pembangunan konektivitas maritim ini dapat tercapai, yaitu kesejahteraan masyarakat.